



## ANALISIS KONSEP KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Agil Nanggala<sup>1)</sup> dan Karim Suryadi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi PKn SPs UPI

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi PKn SPs UPI

Email: [agilnanggala@upi.edu](mailto:agilnanggala@upi.edu) dan [karimsuryadi@upi.edu](mailto:karimsuryadi@upi.edu)

### ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kampus merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada dimensi kurikuler dan sosio-kultural. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan, adalah: 1) bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang berfokus pada pertukaran pelajar, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, dan penelitian memiliki relevansi dengan kajian dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, dimensi kurikuler, kecuali program magang perlu dianalisis dan direfleksikan secara komprehensif relevansinya dengan tujuan filosofis pendidikan nasional, atau diberikan indikator yang jelas, agar tidak menjadi bentuk liberalisasi pendidikan di Indonesia, secara praktik, 2) bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang berfokus pada kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan KKN tematik atau membangun desa, memiliki relevansi dengan kajian dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural.

**Kata Kunci:** *Kampus Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan, Kebijakan Pendidikan.*

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the concept of an independent campus in the perspective of civic education, particularly in curricular dimension and socio-cultural. This research was conducted through a qualitative approach with literature study methods. The process of data analysis in this study includes data reduction, data display, verification and inference. The results of the study obtained, are: 1) the form of learning in the concept of independent campus, which focuses on student exchange, teaching assistance in educational units, and research has relevance to the study and purpose of Citizenship Education, curricular dimensions, unless the internship program needs to be analyzed and*

*reflected comprehensive relevance to the philosophical goals of national education, or given clear indicators, so as not to be a form of liberalization of education in Indonesia, in practice, 2) forms of learning in the concept of independent campus, focusing on entrepreneurial activities, humanitarian projects, independent projects, and thematic KKN or building a village, having relevance to the study and purpose of Citizenship Education socio-cultural dimension.*

**Keywords:** *Independent Campus, Citizenship Education, Education Policy.*

## **PENDAHULUAN**

Konsep kampus merdeka, menjadi pembaharuan dalam kebijakan pendidikan, tentu perlu dianalisis substansi dan praksis kebijakannya melalui keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Dengan orientasi untuk mengetahui, relevannya kebijakan tersebut, dalam membentuk mahasiswa, sehingga menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Sebagai disiplin ilmu yang tidak terbatas dalam pembelajaran di kelas, tentu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi yang mampu merefleksikan sebuah kebijakan. Khususnya yang berfokus pada pendidikan, supaya memiliki semangat Pancasila dan UUD 1945, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Modernisasi perlu direspons secara cepat dan akurat, agar tidak menimbulkan krisis multidimensional. Khususnya yang berkaitan langsung dengan realitas sumber daya manusia Indonesia. Kampus merdeka yang diberlakukan oleh Menteri Nadiem Makarim, tentu merupakan bentuk aktual dalam kebijakan pendidikan tinggi, guna mengoptimalkan eksistensi dari perguruan tinggi. Sehingga kesenjangan pendidikan tinggi, khususnya pada aspek kualitas serta pemerataannya bisa terselesaikan.

Sebagai pembelajaran wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Melalui fakta, bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, bersifat

komprehensif, guna meningkatkan kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada upaya membentuk warga negara Indonesia menjadi pancasilais, sehingga mampu mengamalkan partisipasi publiknya (Nanggala, 2020, hlm. 14). Tentu fakta tersebut, perlu dioptimalkan melalui kebijakan kampus merdeka, sehingga pembelajaran PKn menjadi penuh dengan makna.

Faktanya sifat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner menjadi realitas strategis, dalam membantu negara guna mewujudkan tujuan nasionalnya. Terlebih yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan. Kariadi (2016, hlm. 18) menegaskan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian ilmu pengetahuan yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner, guna menyelesaikan kompleksnya permasalahan sosial. Tentu, dalam konteks kebijakan kampus merdeka, idealnya keilmuan tersebut, menjadi acuan dalam melakukan analisa ilmiah, sekaligus evaluasi strategis, sehingga meminimalisir ketimpangan, antara cita-cita dan realitas.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi keilmuan yang beragam. Tentu dimensi tersebut, berfokus pada aspek PKn sebagai pembelajaran, PKn sebagai kajian ilmiah, serta PKn sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan berkompeten dalam

mengatasi berbagai permasalahan bangsa, karena memiliki dimensi kurikuler, akademik, dan sosio-kultural (Winataputra, 2016, hlm. 18). Realitas keilmuan tersebut, selaras dengan konsep kampus merdeka yang mengakomodir mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, serta pembelajaran langsung dimasyarakat, berupa pengabdian secara sukarela.

Tentu kebijakan kampus merdeka, perlu dioptimalkan, agar civitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, mampu memasifkan publikasi ilmiahnya. Sehingga mengarah pada daya inovasi nasional, yang sampai saat ini, masih dikategorikan belum optimal. Merujuk data yang dipublikasikan oleh World Economic Forum atau WEF (2019) menjelaskan daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara, di bawah Singapura, Malaysia serta Thailand, perhitungan WEF menggabungkan data kuantitatif, yang penilaian peringkat daya saing globalnya didasarkan pada 103 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar. Peran dosen dan mahasiswa dalam memperbaiki daya saing Indonesia tersebut, bisa melalui pengoptimalan penelitian, guna mewujudkan inovasi nasional.

Khususnya dalam kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang harus mampu memberikan informasi objektif, mengenai kompleksnya permasalahan bangsa. Sehingga kajian keilmuan tersebut menjadi sumber rujukan nasional, dalam menganalisis masalah bahkan menyusun formulasi kebijakan secara ilmiah. Dengan orientasi menyelesaikan masalah terkait secara akurat, efektif, menyeluruh, serta tidak menimbulkan masalah baru, karena keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, karena kajian materinya begitu beragam. Nanggala (2020, hlm. 201) memaparkan bahwa Substansi materi PKn berfokus pada ideologi Pancasila, sosial dan politik, nilai

dan moral, hukum dan demokrasi, hak azasi manusia, konstitusi dan ketatanegaraan, kebebasan pers, hubungan internasional, bela negara, kebudayaan dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan, serta substansi materi relevan lainnya.

Secara normatif, kebijakan kampus merdeka memiliki tujuan untuk mengatasi kompleksnya kebutuhan serta tantangan zaman pada era modern ini. Dijelaskan oleh buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka (2020) bahwa kebijakan kampus merdeka memberi keleluasaan, baik bagi perguruan tinggi, untuk mempermudah proses akreditasi, akselerasi guna menjadi PTN-BH, bahkan membuka prodi baru, maupun mahasiswa, untuk melaksanakan perkuliahan di luar prodinya, dengan total 3 semester, juga melakukan penelitian dan pengabdian model baru. Melalui penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa, konsep kampus merdeka, memiliki fokus, yaitu, pembelajaran mahasiswa, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas. Tentu realitas tersebut, memiliki relevansi dengan konsep keilmuan PKn, karena memiliki dimensi, khususnya pada substansi PKn kurikuler dan PKn sosio-kultural.

Modernisasi saat ini, mengharuskan seorang individu memiliki keahlian yang, beragam dan mumpuni. Selanjutnya dalam buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka (2020) dijelaskan bahwa tataran praksis, dari konsep kampus merdeka, yaitu 1) pertukaran pelajar, 2) Praktik Kerja, 3) Asistensi mengajar, 4) Penelitian, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Proyek Independen, dan 8) KKN Tematik atau Membangun Desa. Tentu tujuan baik tersebut, bisa untuk dikolaborasikan bahkan dielaborasi melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga tidak menjadi program yang sifatnya sebatas prosedural dan pragmatis.

Dengan rasionalisasi, bahwa PKn di perguruan tinggi memiliki orientasi dalam memperkuat kapasitas spiritual, intelektual, emosional dan sosial mahasiswa. Sehingga mampu memiliki daya nalar dan landasan moral yang mumpuni, sebagai modal sosial dalam melakukan perannya, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa. Termasuk pada pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dipandang oleh mereka, sebagai kegiatan substansial, yang mampu memperkuat kualitas pribadi serta menjadi wahana dalam menyelesaikan masalah dimasyarakat. PKn memberikan makna akan pentingnya menyelesaikan masalah masyarakat secara holistik, baik strategi penyelesaian masalahnya maupun dari keterlibatan berbagai kalangannya, serta menekankan pentingnya memperbaiki kapasitas pribadi sehingga memiliki peran dalam masyarakat (Aulia dan Arpanudin, 2019, hlm. 8).

Selain memiliki kesamaan pada aspek konsep praksis dari kampus merdeka dengan dimensi PKn, yang difokuskan pada dimensi kurikuler dan sosio-kultural. Tentu memiliki kesamaan pada substansi program tersebut dengan tujuan pembelajaran PKn, yaitu pada upaya memanusiakan manusia. Kebijakan kampus merdeka, memberikan ruang gerak lebih bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuannya. Filsafat humanisme menjadi salah satu dari dasar pemikiran untuk memberlakukan kebijakan kampus merdeka, karena berupaya untuk memperhatikan perkembangan kepribadian manusia, agar mampu mengoptimalkan potensinya serta berguna bagi lingkungan sekitar (Hendri, 2020, hlm. 5).

Kebijakan kampus merdeka tentu perlu dilaksanakan dengan penuh integritas dan moralitas, guna meminimalisir praktik-praktik pendidikan yang mengarah pada

komersialisasi serta menghindari lahirnya tenaga kerja yang murah. Tentu keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki kompetensi mumpuni dalam menganalisis, merefleksikan guna memberikan kritik dan solusi akademik. Sehingga implementasi kebijakan tersebut tidak melenceng jauh dari yang dicita-citakan. Melalui orientasi tersebut, maka pentinglah menganalisis konsep kampus merdeka dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur. Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini, adalah untuk memberikan informasi argumentatif, relevannya konsep kampus merdeka dikolaborasikan bahkan dielaborasikan melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan. khususnya pada dimensi PKn kurikuler dan PKn sosio-kultural. Dengan orientasi agar kebijakan kampus merdeka dalam tataran praksisnya tidak bersifat prosedural serta pragmatis. Tetapi secara nyata menjadi wahana mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Penelitian kualitatif tidak dibatasi oleh kategori tertentu, karena sifatnya yang elaboratif dan mendalam. Sumber literatur pada penelitian ini berfokus pada jurnal, yang didukung oleh sumber yuridis serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan lembaga resmi, baik nasional maupun internasional. Dijadikannya jurnal sebagai sumber literasi primer, karena jurnal memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, agar tidak terjadi kesalahan pada analisis data yang sifatnya konseptual dan prosedural, tentu perlu didukung oleh data sekunder. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan teknik Miles dan Huberman

(1992) yang mengungkapkan bahwa proses analisis kualitatif berfokus pada: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1). Bagaimana Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Kurikuler?**

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, berfokus pada kegiatan pembelajaran. Realitas tersebut, merupakan upaya dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Pada dasarnya bagaimana warga negara bersedia untuk berpartisipasi dalam kepentingan umum, memiliki kepekaasaan sosial yang baik, turut andil dalam menjaga persatuan nasional, serta mengisi kemerdekaan melalui peran aktifnya, apabila tidak diberikan landasan mengenai pengetahuan, pemahaman, serta pembentukan moral. Winataputra dan Budimansyah (dalam Nurdin, 2016, hlm. 21) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik, agar menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis dan berkomitmen.

Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasi melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Idealnya substansi pembelajaran dalam kebijakan kampus merdeka perlu merepresentasikan semangat dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sebagai kajian yang komprehensif, PKn berkompeten dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik, khususnya pada tataran mengakomodir partisipasi serta

memberikan ruang agar menumbuhkan tanggung jawab publik (Shabrina, dkk, 2016, hlm. 82).

Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka, sesungguhnya lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih, agar mahasiswa menguasai disiplin ilmu yang beragam. Dalam upaya menganalisis kebijakan kampus merdeka melalui dimensi PKn kurikuler, tidak harus selalu dengan mengontrak mata kuliah PKn. Lazimnya PKn sebagai mata kuliah wajib, dikontrak oleh mahasiswa pada awal memasuki perguruan tinggi, baik di semester 1, maupun semester 2. Dengan orientasi landasan filosofis pembelajaran PKn harus hadir, sehingga kampus merdeka dalam realitas implementasinya menjadi pembelajaran yang demokratis, terstruktur, adil, menyenangkan, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa pembelajaran di luar prodi bagi mahasiswa yang berminat, dapat dibagi menjadi 4 yaitu, 1) di prodi lain dalam kampus yang sama, 2) di prodi yang sama dalam kampus yang berbeda, 3) di prodi lain dalam kampus yang berbeda dan 4) pembelajaran non-kampus. Tentu kebijakan tersebut akan berhasil, apabila setiap perguruan tinggi berkomunikasi untuk menentukan teknis kerja samanya. Peran Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menyukseskan kebijakan tersebut, berfokus pada upaya memberikan informasi objektif mengenai, pentingnya mengakomodir hak mahasiswa, memberikan ruang lebih bagi mahasiswa untuk berkarya serta mencari pengalaman, bahkan memberikan deskripsi mengenai pentingnya mengeksplorasi diri, agar kehidupan mahasiswa lebih bermakna. Tentu proses belajar di luar prodi serta di

luar perguruan tinggi mahasiswa terkait, begitu merepresentasikan keilmuan PKn, karena bersifat multikultural dan menjadi upaya pengenalan budaya lokal.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada era modern saat ini, perlu mengakomodir terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik, juga perlu menjadikan berbagai permasalahan sosial sebagai sumber pembelajaran PKn kontekstual (Martini, 2018, hlm. 26). Dalam konsep kampus merdeka, ditekankan mengenai pentingnya penguasaan keterampilan yang beragam. Dengan orientasi memiliki modal sosial yang lebih agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan unggul. Idealnya sebagai keilmuan yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara beradab, tentu PKn pada tataran filosofis, teori dan praktiknya, perlu menjadi semangat para pendidik dan birokrat, sehingga implementasi kebijakan kampus merdeka, bisa efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Realitas konsep pembelajaran pada pendidikan tinggi, yang dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, menjadi bentuk aktualisasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam tataran substansi dan praksis dari konsep kampus merdeka yang memiliki kesamaan konsep dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan, akan dianalisis dan direfleksikan. Sebagai upaya menemukan jawaban ilmiah yang sifatnya komprehensif, yang menjadi implementasi nyata dalam memperkaya kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Khususnya pada bentuk pembelajaran kampus merdeka yang berfokus pada pertukaran pelajar, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian, bahkan magang atau praktik kerja yang menuai pro dan kontra, akan dianalisis melalui dimensi PKn kurikuler.

Dalam konteks pertukaran pelajar, dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bahwa program pertukaran pelajar, memiliki tujuan yaitu melestarikan kemultikulturalan menumbuhkan kepekaan sosial, membentuk sikap peduli lingkungan serta memperkaya paradigma pemikiran mahasiswa. Tentu substansi tujuan tersebut begitu mewakili tujuan PKn dalam dimensi kurikuler atau pembelajaran. Baik melalui pendekatan tekstual maupun kontekstual, karena tujuan keilmuan PKn, tidak terbatas pada kajian keilmuan saja, tetapi bersifat komprehensif untuk mengkaji realitas yang terjadi disekitar masyarakat. Dwintari (2018, hlm. 78) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, berperan dalam memberikan pemahaman kepada kaum intelektual dan masyarakat luas, agar menerima perbedaan, menjaga persatuan sosial, melakukan partisipasi publik dan kegiatan positif lainnya.

Selain pada substansi tujuan yang memiliki kesamaan, tentu tujuan program pertukaran pelajar pada kampus merdeka, perlu dilandasi oleh semangat keilmuan PKn, sehingga mahasiswa bisa terpenuhi haknya, tentu tidak sebatas memenuhi hak mahasiswa. Tetapi juga, menjadi landasan teoretis, pentingnya bersikap adil terhadap setiap mahasiswa, guna menimbulkan sikap saling menyayangi dan menghormati antara dosen dan mahasiswa, agar terwujudnya keharmonisan. Terlebih bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut, tentu akan merasa nyaman, karena secara sadar dianggap sebagai keluarga besar program studi terkait, sehingga mahasiswa tersebut, bisa optimal dalam mengeksplorasi dirinya, Pembelajaran PKn, tidak hanya berfokus pada penguatan kompetensi warga negara, tetapi tujuannya luas, termasuk memberi rasionalisasi pentingnya negara memenuhi hak-hak warga negara.

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, tujuan kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan, yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan minat dan bakat mendidik bagi mahasiswa, serta untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Tentu pendidikan perlu dipandang sebagai kegiatan yang luas, tidak hanya dilakukan di lembaga formal saja, tetapi juga lembaga informal dan nonformal. Faktanya tujuan tersebut, begitu merepresentasikan tujuan dari pembelajaran PKn, khususnya pada upaya membentuk warga negara yang baik dan cerdas, lalu menjadi wahana dalam merefleksikan ketimpangan antara cita-cita pendidikan, realitas di lapangan, serta cara untuk memperoleh tujuannya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam kurikulum nasional, karena memiliki tujuan mulia, seperti menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa, memperkuat partisipasinya dan menjadi wahana kontemplasi realitas keadaban bangsa (Hamidah, 2019, hlm. 38).

Program asistensi mengajar pada satuan pendidikan, perlu dioptimalkan agar menjadi pengalaman bermakna mahasiswa. Melalui program tersebut, mahasiswa dapat melihat realitas pendidikan di Indonesia, sehingga menjadi modal pengalaman dalam menumbuhkan moralitas dan membentuk karakternya. Mahasiswa yang memiliki sifat tersebut, tentu akan dengan senang hati, berperan dalam mewujudkan keadilan pada bidang pendidikan. Pembelajaran PKn pun, mengakomodir terbentuknya sifat tersebut, karena memiliki kajian mengenai karakter bangsa, nilai dan moral yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945.

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa tujuan penelitian pada kebijakan kampus merdeka adalah menumbuhkan motivasi belajar dan sikap

kritis mahasiswa. Tentu penelitian menjadi ciri khas sekaligus kewajiban perguruan tinggi, baik dalam upaya memproduktifkan publikasi ilmiah dosen serta mahasiswa, memperkaya khazanah keilmuan nasional, maupun menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan ilmiah. Idealnya penelitian dosen dan mahasiswa pada era modern ini berbasis pada masalah dan produk. Berbasis masalah, penelitian perlu memiliki andil kepada masyarakat, guna mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, dan berbasis produk, baik publikasi ilmiah atau produk relevan lainnya, agar penelitian meninggalkan jejak bermakna, sehingga menjadi acuan ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Melalui materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti, khususnya yang berminat pada kajian ilmu sosial, mampu memilih fokus masalah, sehingga penelitian memiliki tujuan yang jelas, pembelajaran PKn pun, tidak hanya memberikan alternatif pilihan masalah sosial, tetapi juga memberikan deskripsi mengenai etika penelitian.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks keilmuan dan pembelajaran, tentu berfokus pada dinamika kebangsaan, sosial, kebudayaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai Pancasila (Adha, 2020, hlm. 136). Realitas kajian PKn tersebut, tentu menjadi pilihan masalah dalam melaksanakan penelitian ilmu sosial yang berdasarkan pada masalah. Didukung oleh fakta bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu sosial, sehingga disipin ilmu tersebut begitu relevan untuk menjadi sumber acuan dalam mencari masalah untuk penelitian ilmu sosial. Struktur keilmuan dan objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadikan fenomena sosial, sebagai salah satu kajian pentingnya, membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian dari ilmu-ilmu sosial (Setiarsih, 2017, hlm. 81).

Pada kegiatan magang, tentu masih menjadi pro dan kontra. Dijelaskan melalui Permedikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa tujuan dari program magang adalah untuk mengasah *softskill* dan *hardskill* mahasiswa serta memberikan pengamalan yang cukup bagi mahasiswa, mengenai dunia industri. Faktanya program magang yang menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan kampus merdeka, menuai pro dan kontra, dari berbagai karena cenderung mengarah pada liberalisasi pendidikan tinggi, sehingga berpotensi melahirkan tenaga kerja murah, serta berorientasi pada bisnis. Shivshenker (2018, hlm. 22) menjelaskan bahwa liberalisasi pada pendidikan tinggi, nyatanya berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, menghasilkan tenaga kerja murah, berorientasi pada industri, bahkan memperluas peluang untuk korupsi.

Idealnya Pembelajaran PKn perlu menjadikan fenomena magang tersebut, sebagai bahan pembelajaran atau materi analisis bagi mahasiswa, sehingga sampai pada kesimpulan terbaik. Tentu kita tidak berharap, bahwa praktik pendidikan tinggi di Indonesia hanya bersifat pragmatis dan komersial saja. Terlebih bagi mata kuliah yang berfokus pada upaya menanamkan nilai-nilai terpuji kepada mahasiswa, tentu menjadi kurang bermakna apabila pada tataran praktiknya pendidikannya hanya bersifat oportunistik saja. Aini dan Efendi (2019, hlm. 34) menjelaskan pentingnya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia, agar meminimalisir timbulnya karakter mahasiswa yang oportunistik, serta tidak memiliki kepekaan sosial yang baik.

Tentu pembahasan ringkas tersebut, menjadi informasi argumentatif, bahwa konsep kampus merdeka, pada substansi tujuannya memiliki relevansi dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya

pada dimensi kurikuler (pembelajaran). Tetapi untuk program magang, harus dipertimbangkan kembali, agar memiliki kejelasan mengenai relevansinya dengan tujuan filosofis pendidikan nasional, yang diejawantahkan melalui tujuan kurikuler PKn, atau diberikan indikator yang jelas, sehingga tidak menjadi peluang dalam meliberalisasikan pendidikan tinggi, secara praksis. Sebagai upaya meminimalisir lahirnya tenaga kerja yang murah serta berorientasi kepada pasar dan industri, karena pembelajaran PKn tidak untuk membentuk mahasiswa oportunistik, demi kepentingannya sendiri. Idealnya konsep Pendidikan nasional, yang diejawantahkan melalui pembelajaran PKn dalam konteks cita-cita, strategi untuk mencapainya, dan tataran realitasnya, perlu keseimbangan dan kesinambungan, agar efektif, terstruktur dan merepresentasikan kepribadian bangsa.

## **2. Bagaimana Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Sosio-Kultural?**

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural, berfokus pada upaya memberdayakan masyarakat. Tentu sebagai keilmuan yang memiliki tugas berat, karena membentuk kepribadian warga negara. PKn menjadi kajian yang luas tidak terbatas sebagai pembelajaran di sekolah saja, tetapi juga dalam masyarakat umum, baik sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat, maupun menjadi kajian dalam menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena, realitas yang terjadi dimasyarakat. Cogan (dalam Mukhtarom, dkk, 2019, hlm. 156) menjelaskan terdapat perbedaan makna antara *civic education* dan *citizenship education*, khususnya pada ruang lingkup kajiannya, *civic education* merupakan PKn dalam arti sempit atau PKn dalam bentuk

pendidikan formal (sekolah), sedangkan *citizenship education* adalah PKn dalam arti yang luas, sebagai bentuk pendidikan non formal (pendidikan bagi masyarakat).

Tentu masyarakat yang berdaya dan beradab menjadi tujuan penting dijadikannya PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi masyarakat umum. Sehingga mampu mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktifnya. Masyarakat berdaya dalam artian mampu, berkompeten serta mandiri untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada disekitarnya, seperti dalam sektor ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, demokrasi, dan keamanan. Masyarakat yang beradab tentu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga secara sukarela menjalankan perannya, agar memiliki manfaat positif terhadap masyarakat, karena kompleksnya permasalahan yang ada dimasyarakat, tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwajib saja, tetapi secara holistik, sehingga butuh peran aktif dari masyarakat, agar masalah tersebut selesai sebagaimana mestinya.

Faktanya sebagai keilmuan yang menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena dan realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat secara holistik, tentu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki solusi ilmiah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi. Khususnya melalui strategi serta upaya penyelesaian masalah berbasis melibatkan semua pihak. Selain merepresentasikan integrasi bangsa, juga memberi makna, mengenai pentingnya demokrasi, peka sosial dan tanggung jawab. Rahmandani dan Samsuri (2019, hlm. 53) mengungkapkan bahwa sebagai pendidikan bagi masyarakat, tentu PKn berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat, untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik, melalui pendekatan keilmuan yang humanis, yang praktik sosialisasinya dilakukan oleh kaum intelektual maupun pemerintah.

Dalam konsep kampus merdeka, faktanya mengakomodir strategi dan upaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat. Khususnya melalui partisipasi aktif dari mahasiswa, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Termasuk pada upaya untuk mewujudkan integrasi sosial, yang menjadi modal penting dalam mengatasi berbagai masalah yang menjadi penghambat dalam terwujudnya kesejahteraan umum pada kehidupan masyarakat. Yunita dan Suryadi (2018, hlm. 230) mengungkapkan bahwa mahasiswa dalam menjalankan kewajiban bela negara, bisa melalui pengoptimalan perannya dimasyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesejahteraan sosial.

Faktanya, kebijakan kampus merdeka, dalam konteks tujuannya, tidak hanya mengakomodir strategi dan upaya pemberdayaan serta penyejahteraan bagi masyarakat saja, yang merupakan domain utama kajian PKn sosio-kultural. Tetapi juga membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik, dengan rasionalisasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan *civic knowledge*, tetapi komprehensif, termasuk pada penguasaan *civic disposition* dan *civic skills*, sehingga menjadi warga negara yang beradab (*civic virtue*). Tentu, bangsa ini akan mendapat berbagai manfaat positif, apabila kebijakan kampus merdeka diterapkan dengan penuh komitmen dan tidak prosedural. Khususnya yang bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau yang menjadi objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural.

Bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, tentu akan dianalisis melalui kajian PKn, khususnya dimensi sosio-kultural. Dengan orientasi

menemukan relevansi, mengenai tujuan program tersebut dengan tujuan kajian PKn dimensi sosio-kultural, juga sebagai upaya kolaborasi dan elaborasi, antara kebijakan pemerintah, dibidang pendidikan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang pada substansinya berfokus pada masalah keilmuan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegiatan menganalisis konsep kampus merdeka tersebut, melalui kajian PKn dimensi sosio-kultural, akan difokuskan pada bentuk pembelajaran yang dijelaskan oleh Permendikbud di atas, yaitu kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, serta membangun desa atau KKN tematik. PKn dalam dimensi sosio-kultural, tidak hanya menjadi bentuk pembelajaran yang dikhususkan kepada masyarakat, tetapi juga memberi deskripsi mengenai realitas yang terjadi, sehingga menjadi acuan bagi kaum intelektual untuk menyusun upaya ilmiah dalam mengatasi masalah yang ada (Tiara dan Yarni, 2019, hlm. 300).

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa kewirausahaan merupakan salah satu bentuk pembelajaran dari kebijakan kampus merdeka. Substansi tujuan dari kegiatan wirausaha adalah untuk membentuk minat dan bakat berwirausaha bagi mahasiswa, serta sebagai upaya dalam mengatasi masalah mengenai kemiskinan dan pengangguran dimasyarakat. Faktanya dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdapat konsep *economic civic*, yang tentu memiliki relevansi, dengan kewirausahaan yang menjadi bentuk pembelajaran kampus merdeka. *Economic civic* atau ekonomi warga negara, merupakan kajian sekaligus kegiatan yang berfokus pengenalan konsep dan prinsip ekonomi kepada warga negara, sebagai strategi dan upaya memberdayakan ekonominya, agar menjadi warga negara atau

komunitas masyarakat yang berdikari (Rubei, 2014, hlm. 60)

Idealnya program Kewirausahaan, perlu dioptimalkan sebaik dan sebijaksana mungkin. Guna meminimalisir terjadinya pengangguran dimasyarakat, serta menjadi wahana partisipasi bagi mahasiswa untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tentu kewirausahaan, begitu merepresentasikan kemandirian, sehingga mahasiswa tersebut, tidak selalu bergantung pada negara, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan keberadaannya turut meringankan beban negara, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan rasionalisasi tersebutlah, PKn memiliki salah satu fokus kajian, yaitu pemberdayaan ekonomi warga negara, yang memiliki relevansi dengan kegiatan wirausaha pada kampus merdeka.

Proyek kemanusiaan, menjadi salah satu bentuk dari pembelajaran dari kampus merdeka. Melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tujuan dari proyek kemanusiaan adalah membentuk mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki kepekaan sosial dan hidup berdasarkan agama, moral serta etika. Tentu tujuan tersebut, sangat merepresentasikan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, baik pada kompetensi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Septiana (2020, hlm. 42) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan kepada mahasiswa, yang didasari oleh Pancasila.

Nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat penting agar terwujudnya keadaban warga negara. Nilai-nilai kemanusiaan bisa dihabituasikan melalui pembelajaran dan pembiasaan, termasuk diinternalisasikan melalui kebijakan kampus merdeka yang di dalamnya terdapat program spesifik dalam menubuhkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu

proyek kemanusiaan. Tentu tujuan tersebut merepresentasikan, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, karena berupaya dalam membentuk warga negara yang memiliki nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai-nilai kemanusiaan, agar menjadi warga negara yang beradab (*civic virtue*). Terlebih pada era globalisasi saat ini, tentu internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya kepada generasi muda, harus lebih dimasifkan lagi, khususnya, agar memiliki kepekaan yang baik terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (sosio-kultural).

Dalam konteks proyek independen, dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa orientasi programnya yaitu mengoptimalkan minat, bakat, inovasi dan kreatifitas mahasiswa agar berprestasi, ditingkat nasional dan internasional. Tentu keahlian tersebut begitu penting, khususnya era modern saat ini, karena sifatnya lebih kompetitif. Faktanya keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki tujuan dalam membentuk peserta didik agar mempunyai keterampilan yang mumpuni dan beragam, atas didasar hak-hak warga negara. Wadu, dkk (2020, hlm. 122) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki orientasi dalam mengembangkan keahlian atau keterampilan warga negara, melalui elaborasi keilmuannya, karena kajian PKn sifatnya teoretis dan praksis.

Idealnya proyek Independen, selain berorientasi untuk memperkuat keahlian dan keterampilan mahasiswa, juga harus menjadi sarana refleksi bagi mahasiswa. Khususnya mengenai sejauh mana realitas kompetensi dirinya, bahkan perlu menjadi wahana kontemplasi bagi mahasiswa, pada aspek realitas hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta dengan individu lain. Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pembelajaran wajib, memberikan peta jalan bagi pendidikan Indonesia, dalam

upaya mengakomodir dan mengoptimalkan keterampilan mahasiswa serta keterlibatan masyarakat, sehingga memiliki manfaat komprehensif. Didukung oleh fakta bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan keilmuan yang mengajarkan pentingnya keseimbangan implementasi dari hak dan kewajiban, serta memiliki fokus kajian yang luas, termasuk kemasyarakatan (sosio-kultural).

Pada konteks KKN tematik atau membangun desa yang merupakan bentuk pembelajaran kampus merdeka, dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa tujuannya yaitu mengidentifikasi potensi desa, dan membentuk mahasiswa, supaya memiliki sifat-sifat kepemimpinan, bahkan memberikan pengalaman bermakna mengenai pembelajaran langsung dalam masyarakat. Tentu tujuan tersebut memiliki relevansi dengan kajian PKn, pada dimensi sosio-kultural, yang berusaha menganalisis dan merefleksikan realitas dimasyarakat. Sebagai keilmuan yang pendekatannya interdisipliner, Pendidikan Kewarganegaraan berkompeten untuk menjadi rujukan serta strategi ilmiah, baik dalam melaksanakan pendekatan serta pemberdayaan publik, mengatasi masalah secara komprehensif, maupun menjadi pendidikan demokrasi dan politik bagi masyarakat. Yuniarto (2020, hlm. 70) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, karena turut menghendaki terjadinya keterlibatan masyarakat.

Melakukan pembelajaran langsung dimasyarakat, memiliki berbagai manfaat positif. Terlebih pada upaya menimbulkan sifat mahasiswa yang peka sosial, mandiri, disiplin, solid, sukarela, bahkan memiliki mental melayani masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan dikolaborasikan dengan *service learning* (pembelajar melayani),

tentu memiliki berbagai manfaat positif dan memberikan pengalaman yang bermakna, karena menjadi wahana bagi mahasiswa, untuk mengimplementasikan kompetensi kewarganegaraannya, dan menjadi penguat keterlibatan masyarakat (Karliani, 2014, hlm. 75). Melalui dimensi sosio-kultural, pada kajian PKn, nyatanya memberikan deskripsi penting, mengenai masyarakat yang diharapkan (madani), dengan realitas sesungguhnya, sehingga diperlukan strategi serta upaya ilmiah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Faktanya analisis ringkas tersebut, menjadi informasi argumentatif, khususnya pada fakta bahwa konsep kampus merdeka, memiliki relevansi dengan substansi serta tujuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan pada dimensi sosio-kultural. Didukung oleh realitas, bahwa orientasi kebijakan kampus merdeka, yang difokuskan kepada bentuk pembelajaran, yaitu kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen dan KKN tematik atau membangun desa, mengarah pada upaya memberdayakan mahasiswa dan masyarakat, serta penyelesaian masalah secara holistik. Tentu PKn dalam konteks keilmuan dan pembelajarannya, idealnya menjadikan realitas sosial dan kebangsaan sebagai sumber pembelajarannya, sebagai upaya sinkronisasi, antara materi di kelas dengan realitas sesungguhnya. Diperkuat oleh fakta, bahwa keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, bukan hanya menjadi pembelajaran bagi peserta didik saja, tetapi juga bagi masyarakat umum.

## **KESIMPULAN**

Konsep kampus merdeka, memiliki relevansi dengan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada aspek dimensi kurikuler dan sosio-kultural. Tentu realitas ilmiah tersebut, perlu dioptimalkan sebaik dan sebijaksana mungkin, sebagai

upaya pemenuhan hak-hak mahasiswa, pemberdayaan masyarakat, menyelesaikan masalah kompleks yang ada dimasyarakat, juga sebagai upaya modernisasi pendidikan di Indonesia. Dalam bentuk pembelajaran pada kampus merdeka, yaitu magang, perlu diperhatikan kembali relevansinya dengan tujuan filosofis nasional, atau diberikan indikator jelas agar tidak menjadi peluang dalam meliberalisasikan pendidikan bangsa Indonesia, pada tataran praktik. Pendidikan Kewarganegaraan, pada konteks kajiannya bersifat kompleks, tentu perlu dioptimalkan sebaik serta sebijaksana mungkin, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan demokratisasi, yang dikolaborasikan melalui kebijakan kampus merdeka.

Keterlibatan aktif mahasiswa dan dukungan penuh dari dosen Pendidikan Kewarganegaraan serta pemerintah terkait, agar kebijakan kampus merdeka sukses terlaksana. Terlebih pada upaya untuk memberdayakan masyarakat dan penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, yang hasilnya, hanya bisa dievaluasi dan direfleksikan setelah program tersebut selesai dan berkelanjutan. Faktanya kajian PKn harus menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, sebagai strategi meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas praktik dari pembelajaran kampus merdeka. Mengingat posisi PKn dalam kurikulum nasional, tentu harus seimbang dengan peran nyata keilmuan tersebut, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Adha, M. M. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. 15 (1). Hlm. 121-138.

- Aini, D. N. & Efendi, A. (2019). Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila Dalam Pendidikan Vokasi. *Jurnal Belaindika*. 1 (1). Hlm. 34-45.
- Aulia, S. S. & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Lingkup Sosiokultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education*. 3 (1). Hlm. 1-12.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*. 2 (1). Hlm. 69-81.
- Hamidah. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Forum Faedagogik*. 11 (1). Hlm. 27-38.
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *Jurnal E-Tech*. 8 (1). Hlm. 1-9.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kariadi, D. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*. 1 (1). Hlm. 14- 23.
- Karliani, E. (2014). Membangun *Civic Engagement* Melalui Model *Service Learning* untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 23 (2). Hlm. 71-78.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Martini, E. (2018). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3 (2). Hlm. 21-27.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mukhtarom, A. Arwen, D. & Kurniyati, E. (2019). Urgensi *Civic Education* dalam Kehidupan Bernegara. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*. 1 (2). Hlm. 152-162.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. 9 (1). Hlm. 9-23.
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*. 3 (2). Hlm. 197-210.
- Nurdin, E. S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*. 9 (1). Hlm. 11-30.
- Rahmandani, F. & Samsuri. (2019). Malang *Corruption Watch* sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Guna Membangun Budaya Anti-Korupsi di Daerah. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 21 (1). Hlm. 49-59.
- Rubei, M. A. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk *Economic Civic* (Ekonomi Warga Negara). *Jurnal Civicus*. 14 (2). Hlm. 54-73.
- Septiana, T. (2020). Pembinaan *Civic Disposition* Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan pada Pembelajaran Pendidikan Kerwarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota

- Sukabumi. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*. 18 (1). Hlm. 33-43.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus Pendidikan Kritis (*Critical Pedagogy*) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5 (2). Hlm. 76-85.
- Shabrina, T. F., Halimi, M. & Komalasari, K. (2016). Implementasi Gerakan Citarum Bestari (GCB) dalam Menumbuhkan *Civic Responsibility* terhadap Lingkungan. *Jurnal Civicus*. 16 (1). Hlm. 80-87.
- Shivshenker. (2018). Impact of Liberalization and Globalization on Higher Education. *International Journal of Scientific Research*. 7 (5). Hlm. 21-23.
- Tiara, M. & Yarni, M. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural di SMA Kota Padang. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 2 (1). Hlm. 297-302.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edukos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*. 9 (1). Hlm. 56-72.
- Yunita. & Suryadi, K. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme bagi Mahasiswa. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. 5 (2). Hlm. 2230-237.
- Wadu, L. B. Ladamay, I. & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 10 (1). Hlm. 116-125.
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1(1). Hlm. 15-36.
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Swiss: WEC.